PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EVIANA HIKAMUDIN**
2. Jabatan : **KETUA PROGRAM STUDI PEDAGOGIK PROGRAM MAGISTER**
3. NHK : **848460**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 447.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, YAMAHA R-15 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

7. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**57.806.487**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.804.806.487**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**102.225.141**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.702.581.346**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.